**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI SURADADI KABUPATEN TEGAL   
(Studi Putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

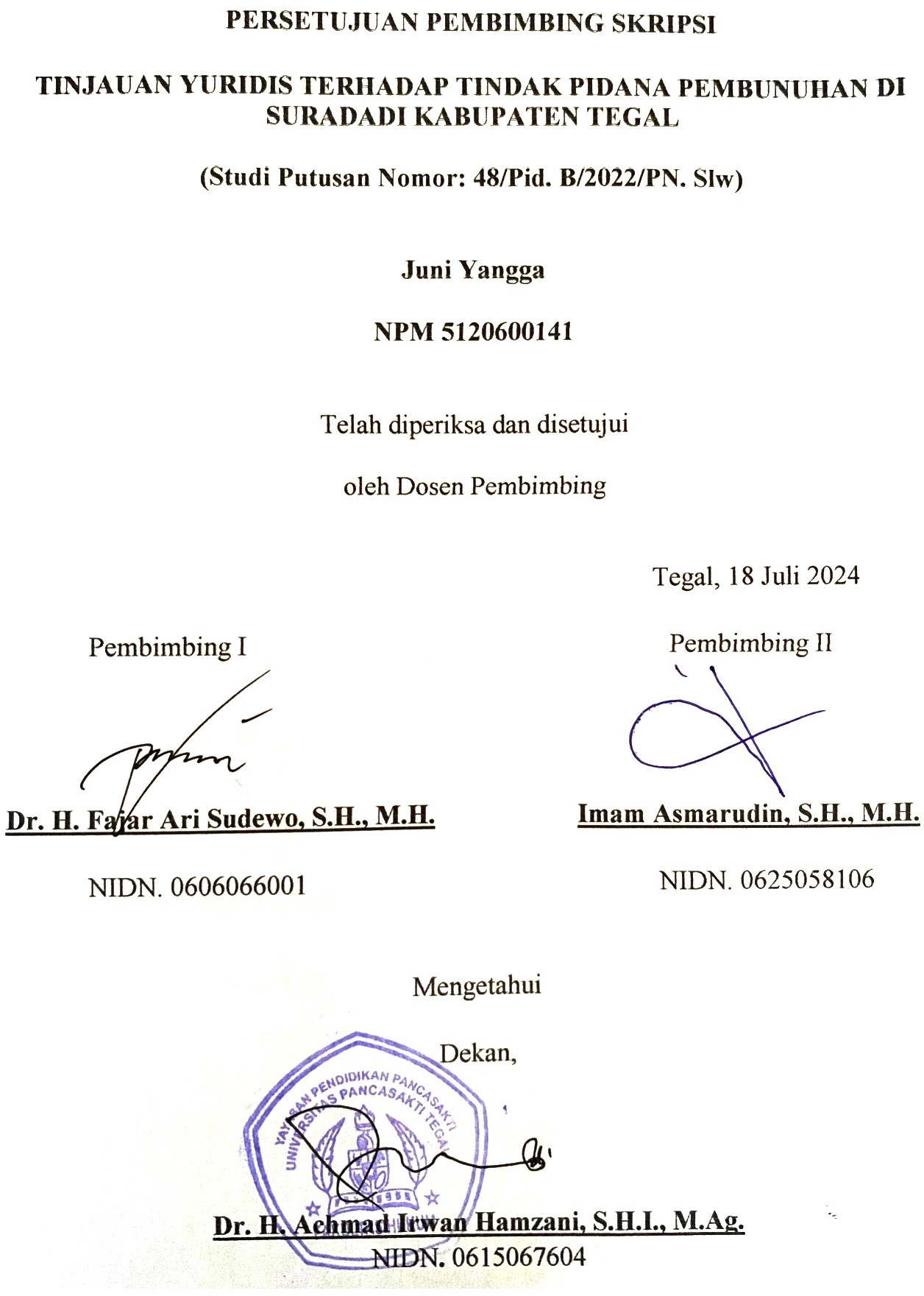
**JUNI YANGGA**

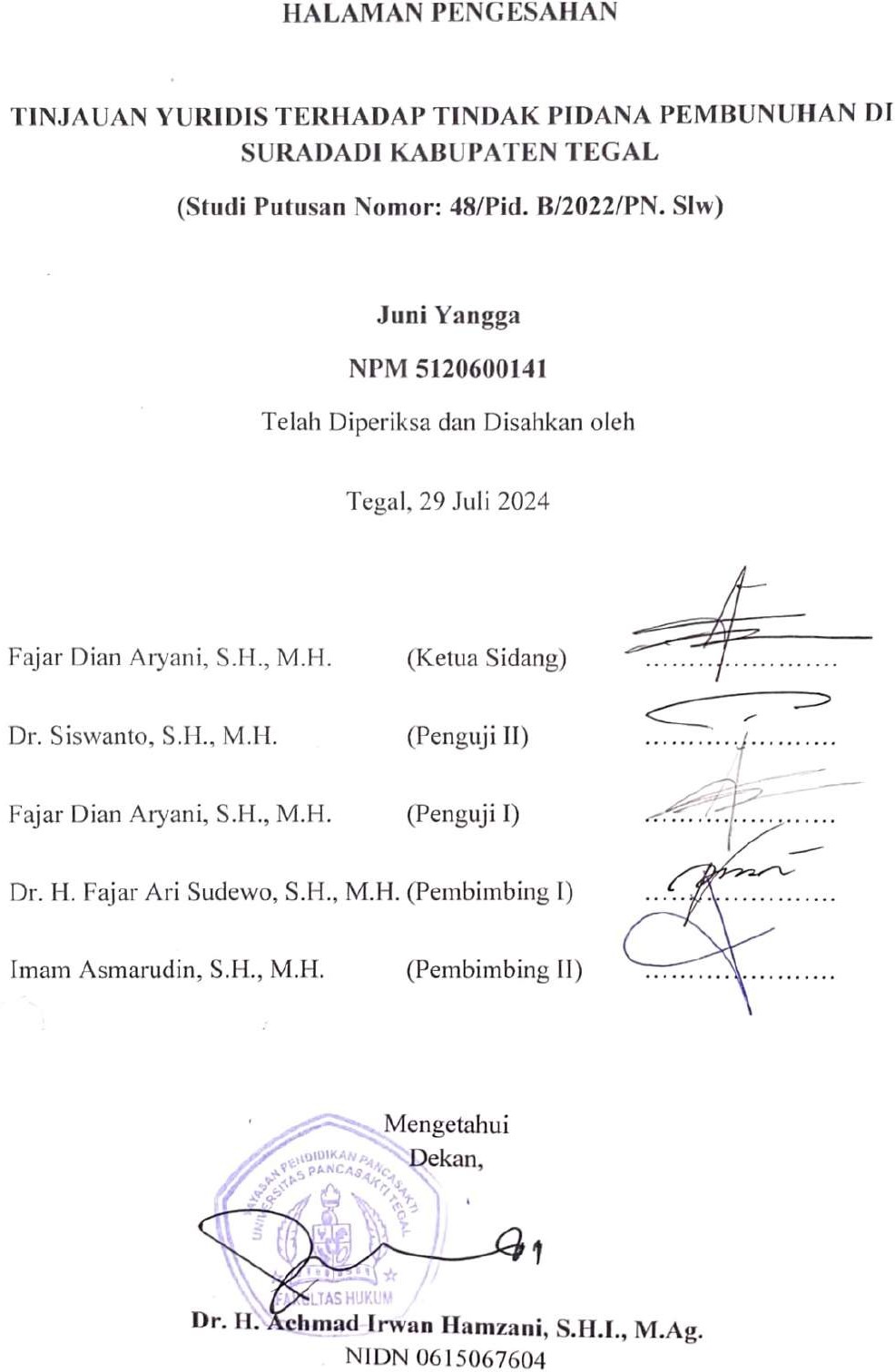
**NPM 5120600141**

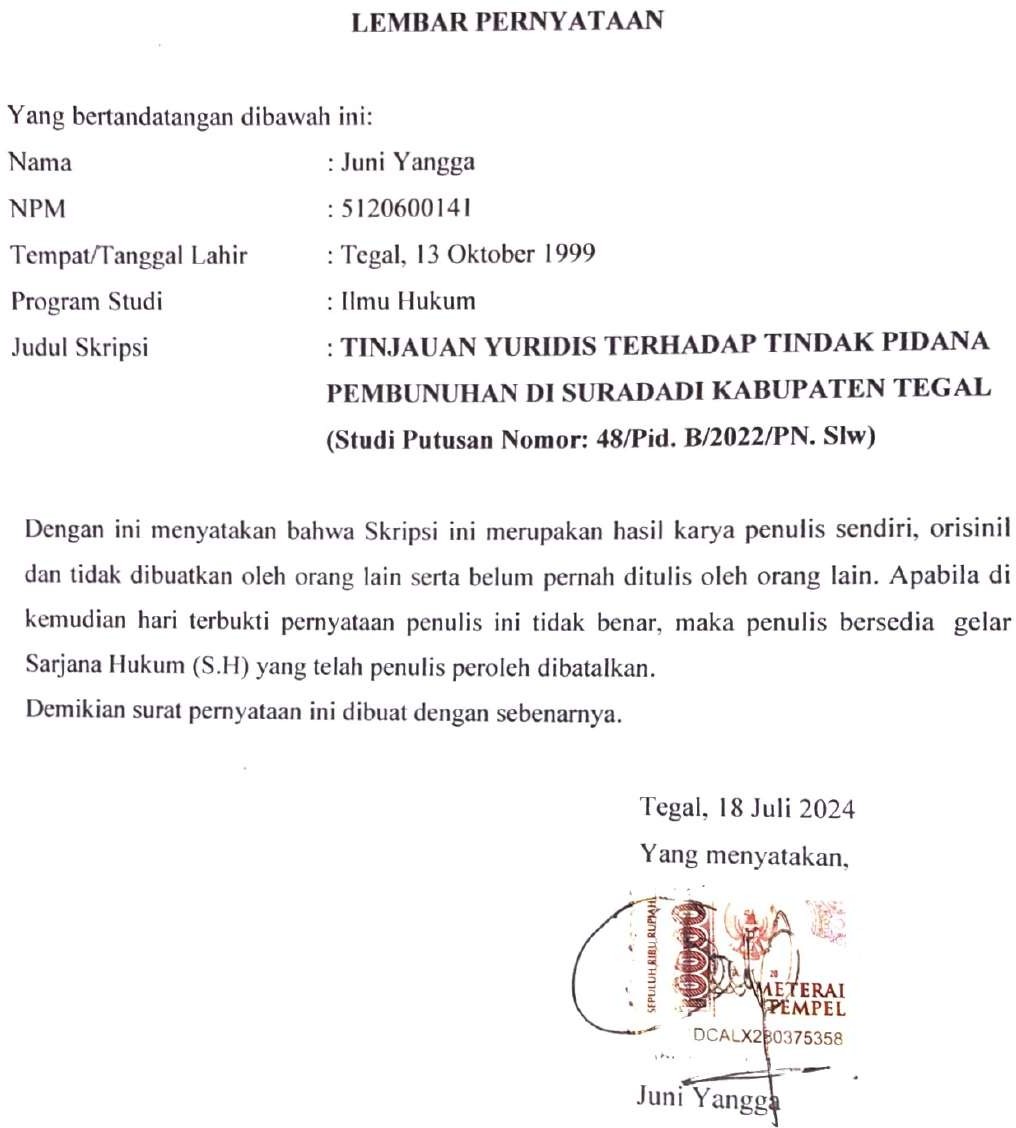
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

[](https://onlinecamscanner.com/)





**Abstrak**

# Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Kejahatan merupakan hal yang selalu ditemui manusia dari masa ke masa. Salah satu bentuk kejahatan yang ada adalah pembunuhan. Pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengakhiri hidup orang lain.

# Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana dalam perkara Putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw ; 2) mengkaji tinjauan yuridis dalam pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara Putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan studi ini yaitu penelitian hukum atau yuridis normatif (*Legal Reserch)* dengan pendekatan penelitian *case approach* dan pendeketan penelitian *statute approach* yang mempergunakan data penelitian sekunder dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Putusan hakim ketika menyelidiki dan mengadili perkara pidana didasarkan pada Pasal 338 KUHP. Nomor: 48/Pid. B/PN. Slw. Putusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, yang menunjukkan bahwa terdakwa membunuh seseorang dalam keadaan sadar dan tanpa berpikir panjang. Karena hakim Pengadilan Negeri Slawi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat dalam Pasal 340 KUHP, maka hakim menolak untuk mengadili terdakwa dengan tindak pidana tersebut. 2) Pembunuhan dengan mutilasi dan pembunuhan biasa bukanlah hal yang sama. Namun hakim menjerat terdakwa dengan Pasal 338 KUHP. Pada tinjauan yuridis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw. pembunuhan yang dibarengi mutilasi disamakan dengan pembunuhan biasa.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukaan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

# Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pembunuhan, Putusan Pengadilan.

# Abstract

*Criminal law is a rule or law that can regulate violations and crimes against the public interest, and perpetrators can be threatened with punishment in the form of suffering or torture. Crime is something that humans always encounter from time to time. One form of crime that exists is murder. Murder is defined as an act that intentionally or unintentionally ends another person's life.*

*This research aims to: 1) examine the judge's considerations in imposing criminal sentences in the case of Decision Number: 48/Pid. B/2022/PN. Slw ; 2) reviewing the juridical review in giving punishment to perpetrators of criminal acts of murder in the case of Decision Number: 48/Pid. B/2022/PN. Slw. The type of research used in writing this study is normative legal or juridical research (Legal Research) with a case approach research approach and a statute approach research approach which uses secondary research data with qualitative analysis.*

*The results of this research show that: 1) The judge's decision when investigating and trying criminal cases is based on Article 338 of the Criminal Code. Number: 48/Pid. B/PN. Slw. This verdict was based on the evidence presented during the trial, which showed that the defendant killed someone consciously and without thinking. Because the Slawi District Court judge was of the opinion that the defendant's actions did not meet the requirements of Article 340 of the Criminal Code, the judge refused to try the defendant for this crime. 2) Murder by mutilation and simple murder are not the same thing. However, the judge charged the defendant with Article 338 of the Criminal Code. In the judicial review based on the decision of the Slawi District Court Number: 48/Pid. B/2022/PN. Slw. murder accompanied by mutilation is equated with ordinary murder.*

*Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

***Keywords: Criminal Sanctions, Murder, Court Decision****.*

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, kita memuji dan meminta pertolongan kepadaNya. Berkat rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Agung yang memberikan penulis kemudahan dalam segala urusan. Penulisan Skipsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almh. Ibu Kasni korban pembunuhan beserta keluarganya. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kesadaran masyarakat untuk selalu berhati-hati dan berbuat baik.

2. Alm. Bapak & Ibu penulis serta keluarga. Alhamdulilah terima kasih untuk kerja keras dan doa tulus dari kedua orangtua penulis, semoga Allah SWT menjaga dan merahmati mereka.

3. Pembimbing penulis. Terima kasih penulis sampaikan atas bimbingannya. Kepada Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Serta kepada Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H. yang telah mengarahkan dan membimbing langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Penulis sendiri. Alhamdulilah penulis bisa menyelesaikan ini sendiri dengan kerja dan usaha penulis murni.

5. Teman dekat penulis. Terima kasih sudah menyemangati penulis dan memberikan masukan kepada penulis.

**MOTTO**

“Kelak di akhirat Allah akan membalas perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia, maka teruslah berbuat baik.”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

Al Baqarah (286)

“Kamu bisa mengandalkan orang lain, tetapi sesungguhnya yang bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri.”

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulilah penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan Skripsi ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammas SAW, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I), Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Ibu dan Bapak serta saudara-saudari penulis yang memberikan dukungan moral pada penulis dalam menempuh studi.
9. Teman penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal,18 Juli 2024

Hormat Saya,

Juni Yangga

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL………………………………………………………….....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………………………………….ii

HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………......iii

HALAMAN PERNYATAAN………………………………………………......iv

ABSTRAK………………………………………………………………….........v

PERSEMBAHAN…………………………………………………………….....vii

MOTTO…………………………………………………………………………viii

KATA PENGANTAR……………………………………………………………ix

DAFTAR ISI……………………………………………………………………..xi

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………….....1

A. Latar Belakang………………………………………………………..………1

B. Rumusan Masalah………………………………………………..…………...5

C. Tujuan Penelitian…………………………………………………….…...…...5

D. Urgensi Penelitian…………………………………………………….……....5

E. Tinjauan Pustaka……………………………………………………….……..6

F. Metode Penelitian……………………………………………………….…….7

G. Sistematika Penulisan………………………………………………………..11

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL………………………………….……....14

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana………………………………..…...14

1. Pengertian Tindak Pidana………………………………………..……..…......14

2. Unsur-unsur Tindak Pidana…………………………………….……………..16

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan……………..………...19

1. Pengertian Pembunuhan………………………………………………….........19

2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan…………………………………...….........21

C. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan…………....………….23

1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan……………………….……….......23

2. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan………….……..…......27

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pemidanaan………………...29

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pemidanaan………………………………....29

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pemidanaan………………………………32

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN………………………………………..41

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Perkara Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw………………….41  
B. Tinjauan Yuridis Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Perkara Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw………………………………...51  
BAB IV PENUTUP…..…………………………………………………………73  
A.Kesimpulan…………..………………...…………………………….…...……73  
B.Saran….…………………………………………………………….………….74  
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..75  
LAMPIRAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

# Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur pelanggaran dan tindak kejahatan yang merugikan kepentingan umum, dengan ancaman hukuman berupa penderitaan atau siksaan bagi pelakunya. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum di Indonesia. Hukum sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, membatasi semua aspek kehidupan, dan menjadi sistem penting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan kekuasaannya. Dengan diterapkannya hukum di Indonesia, seluruh warga negara harus mematuhinya, termasuk hukum pidana, perdata, dan lainnya. Orang yang melanggar hukum terkait kejahatan terhadap kepentingan umum akan diadili melalui hukum pidana. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana merupakan perangkat hukum yang telah lama memiliki peranan penting.[[1]](#footnote-1)

# Manusia terkadang berhadapan dengan persoalan kejahatan. Penyebab kejahatan dan cara menghentikannya selalu menjadi topik diskusi. Karena kejahatan adalah masalah kemanusiaan, maka kejahatan akan selalu ada dimanapun ada manusia. Sebabnya pemerintah mesti bersikap tegas, keras, dan tanggap dalam upaya memberantas dan mengusut tuntas seluruh aspek kejahatan, mengingat meningkatnya kasus kejahatan terorganisir di tanah air. Kasus pembunuhan juga termasuk dalam hal ini. Pelaku mengincar nyawa dan jiwa seseorang yang tidak tergantikan dan tidak dapat dijarah, Hal itu berlawanan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

# Salah satu bentuk kejahatan yang ada yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah kejahatan serius yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Media seperti surat kabar, majalah, dan berita online sering melaporkan kejadian pembunuhan. Kejahatan ini telah dikenal sejak zaman dahulu dan disebabkan oleh berbagai faktor. Di era modern, kasus pembunuhan semakin meningkat. Dilihat sejarah, pembunuhan sudah ada sejak lama, bisa disebut sebagai kejahatan klasik namun terus berkembang seiring dengan budaya manusia.

Tindak pidana Pembunuhan adalah tindakan yang berakibat lenyapnya jiwa seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Perbedaan dalam cara pelaksanaan pembunuhan ini mempengaruhi konsekuensi hukumnya. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau direncanakan sebelumnya, hukuman pidana akan lebih berat dibandingkan dengan hukuman untuk pembunuhan yang dilakukan tidak dengan perencanaa sebelumnya atau tanpa unsur-unsur pemberat lainnya.

Kasus pembunuhan Kasni merupakan salah satu kasus pembunuhan yang ditangani Pengadilan Negeri Slawi. Kasni merupakan seorang petani di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal dengan tempat kejadian perkara di area persawahan masuk Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, pada 2 Maret 2022 dengan Terdakwa Akhadirun yang merupakan warga Banjarnegara. Bahwa pada hari itu sekitar pukul 15.30 WIB, Wage yang merupakan suami korban mencari keberadaan Kasni yang tidak kunjung pulang dari sawah yang biasanya ketika adzan dhuhur korban pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat namun pada siang itu korban tidak kunjung pulang dari sawah. Hingga kemudian Wage mencarinya ke sawah dan menemukan sang istri sudah dalam situasi tak bernyawa dengan badan yang terlentang, leher tersayat, payudara serta alat kelamin korban terpotong. Wage meminta tolong kepada warga sekitar yang kebetulan sedang melintas di jalan persawahan, kemudian membawa jenazah korban ke rumah dengan mobil *pick-up*. Setelah itu Wage beserta saksi lain melaporkan kejadian ini kepada Polsek Suradadi.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tim Sat Reskim Polres Tegal diketahui pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 hingga hari Rabu 2 Maret 2022 ada beberapa warga yang melihat orang asing yaitu terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan tas ransel warna coklat hitam, topi hitam, celana panjang warna hitam, dan membawa sandal jepit warna putih tali biru di area persawahan masuk Desa Jatibogor Kecamata Suradadi Kabupaten Tegal. Setelah dilakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 warga desa melihat terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan warga kemudian diserahkan ke Polsek Suradadi. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa oleh Tim Sat Reskim Polres Tegal bersama dengan Tim Inafis Polda Jateng ditemukan bercak darah pada kuku, baju, dan *cutter* milik terdakwa. Setelah dilakukan Tes/Uji DNA terdapat kesamaan bercak darah tersebut dengan darah milik korban. Kemudian dilakukan visum dengan hasil visum et repertum nomor: VER/09/III/2022/Biddokes diketahui korban meninggal dunia akibat sayatan/irisan pada bagian leher putus atas pembuluh darah leher kiri yang berakibat pendarahan hebat yang dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan pisau *cutter* warna putih milik terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan tes psikologi dengan hasil terdakwa adalah pribadi yang pendiam, kurang kominikatif, dan emosi belum matang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan melakukan pembunuhan terhadap korban secara sengaja dan tidak dipikir-pikir terlebih dahulu. Setelah korban tidak bergerak kemudian terdakwa memotong bagian tubuh korban (payudara dan kemaluan). Berdasarkan KUHP Pasal 338, Majelis hakim menjerat terdakwa Akhadirun dan dijatuhi hukuman penjara 15 tahun.[[2]](#footnote-2)

Kasus dalam putusan Nomor: 48/Pid.B/2022/PN. Slw bahwa terdakwa dijatuhi hukuman penjara 15 tahun, apabila melihat fakta yang terjadi di TKP bahwa terdakwa merupakan orang asing dan bukan penduduk asli daerah tersebut. Terdakwa tidak ada hubungan dan masalah dengan korban, namun dengan sengaja dan tanpa dipikir-pikir terlebih dahulu melakukan pembunuhan disertai mutilasi kepada Kasni yang sedang bekerja di sawah. Menurut ilmu hukum, “tujuan hukum yaitu menegakkan keadilan dan ketertiban”. Kepastian hukum akan hilang bila tujuan hukum tidak terpenuhi. Negara kita belum memiliki undang-undang atau pasal yang melarang pembunuhan dan mutilasi yang memberikan efek ketidakjelasan hukum. Terdakwa dalam hal ini sebagaimana dalam perkara Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw, hanya didakwa melakukan pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Bagi korban dan keluarganya putusan hakim ini belum tercapainya keadilan ini memperlihatkan bahwa sanksi yang dijatuhkan perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus terdakwa. Penting untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap sanksi pidana yang harus diterapkan pada pelaku pembunuhan disertai mutilasi sesuai dengan putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi putusan hakim dalam kasus konkret tersebut. Kekosongan hukum ini perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mencegah kasus serupa di masa depan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Hakim gagal memberikan elemen keadilan yang diperlukan bagi korban dan keluarganya jika dilihat dalam putusan ini. Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dievaluasi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Diperlukan tinjauan yudiris terhadap hukuman pelaku pembunuhan yang juga melakukan mutilasi korbannya sesuai dengan putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw supaya menjadi bahan perbaikan penilaian terhadap putusan hakim yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi. Masyarakat memerlukan kepastian hukum untuk membuat lingkungan yang nyaman dan aman, dan kekosongan hukum ini perlu dipikirkan pemerintah agar kejadian serupa tidak terjadi.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai pertimbangan hukum dan penerapan hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Suradadi Kabupaten Tegal (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.B/2022/PN.Slw).”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana dalam perkara putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana dalam putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw.
2. Untuk mengkaji tinjauan yuridis dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw.

**D. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis manupun manfaat secara praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam memberikan hukuman kepada pelaku pembunuhan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Tegal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan yang kapan saja bisa datang, agar selalu berhati-hati dan waspada kepada orang baru maupun orang dekat. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi lembaga pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada umumnya.

**E. Tinjauan Pustaka**

1. Studi yang ditulis oleh Fiddy Yeni Alfianti dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 10/PID/2020/PT JAP” merupakan studi yang ditulis dengan fokus analisis yuridis berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP, mutilasi yang dibarengi dengan pembunuhan sama saja dengan pembunuhan biasa. Pasal 338 KUHP digunakan untuk menuntut terdakwa. Pembunuhan biasa dan pembunuhan dengan mutilasi jelas merupakan dua kejahatan yang berbeda, dan oleh karena itu keduanya harus diperlakukan berbeda dalam hal hukuman. Aturan khusus harus diterapkan untuk tindak pidana mutilasi, dan pembatasan ini harus dituangkan dalam dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan.[[3]](#footnote-3)
2. Studi selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Sindi Febrianda BR Sitepu mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat”. Penelitan tersebut berfokus pada kajian terkait pertanggungjawaban pidana yang merupakan landasan untuk menilai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum atau kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga menentukan apakah pelakunya dapat dihukum. Karena rasa bersalah menjadi dasar untuk menentukan kesalahan pidana, maka hakim dalam kasus ini menghukum terdakwa 14 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Oleh karena itu, dia wajib menjalani masa hukumannya.[[4]](#footnote-4)
3. Setelahnya yaitu skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Politik Pelalawan” yang ditulis oleh Jona Martua Manullang, membahas tentang upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan melalui pengawasan dan razia di lokasi hiburan malam, penyuluhan, serta pemantauan media cetak dan elektronik.[[5]](#footnote-5)

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yaitu studi hukum atau Yuridis Normatif, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi dengan mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum, aturan-aturan hukum, serta norma-norma hukum yang berlaku, dan kemudian menghubungkannya dengan isu hukum yang menjadi fokus permasalahan. Penelitian ini Data diperoleh melalui penelitian perpustakaan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder, sehingga diharapkan bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang telah ditentukan. Studi yang akan dilakukan juga akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari objek dalam situasi alami, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada pemaknaan daripada generalisasi.[[6]](#footnote-6) Studi pustaka adalah sebuah penelitian dengan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen.[[7]](#footnote-7) Dengan memahami akar permasalahan ini secara mendalam, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini akan memakai pendekatan *case approach,* yakni Pendekatan kasus dikerjakan dengan mengamati kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi dan sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan *statute approach,* yaitu Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meneliti semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Alasan pemilihan metode pendekatan ini, didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji bahan hukum yang digunakan untuk mengungkap terkaitan teori, gagasan, dan asas hukum yang ada dalam keadaan masyarakat dan dimunculkan dalam penelitian yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan tindak pidana lainnya.

3. Data Penelitian

Penulisan skripsi ini akan menggunakan data sekunder. Menurut Edi Riadi, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari situs web atau referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis akan menggunakan data sekunder studi pustaka. Menurut Mukhadis, Ibnu, dan Dasna bahan studi pustaka dapat berasal dari tiga sumber : [[8]](#footnote-8)

1. Bahan Hukum Primer

Semua undang-undang formal yang dibuat oleh lembaga pemerintah, lembaga negara, atau badan lain dengan maksud untuk menegakkan ketentuan-ketentuannya dengan menggunakan kewenangan koersif yang dilakukan oleh otoritas negara dianggap sebagai bahan hukum primer.

1. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi mengenai masalah hukum yang tidak termasuk makalah resmi dianggap sebagai sumber hukum sekunder. Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tidak secara resmi dikategorikan sebagai bagian dari hukum positif. Meskipun mengandung materi hukum, bahan ini tidak atau belum pernah diratifikasi melalui proses formal sebagai hukum.[[9]](#footnote-9)

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum sebagai penjelas serta petunjuk dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang ada atau di kutip oleh penulis dalam penelitian ini. Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan website terkait merupakan contoh bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memakai berbagai teknik pengumpulan data saat mengumpulkan informasi untuk penelitian mereka yang akan dipublikasikan. Data sekunder sendiri dapat dikumpulkan dengan beragam variasi yang berbeda. Dalam penelitian yuridis normatif dikenal 3 jenis metode pengumpulan data sekunder, antara lain metode tersebut yaitu : [[10]](#footnote-10)

1. Studi pustaka (bibliography study) adalah analisis terhadap informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.
2. Studi dokumen *(document study)* merupakan analisis informasi yang tercatat tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara luas dan tidak boleh diakses oleh pihak tertentu.
3. Studi arsip *(file or record study)* analisis informasi tertulis mengenai kejadian-kejadian di masa lalu (termasuk peristiwa hukum) yang memiliki nilai sejarah, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk dijadikan referensi.

Penulis dalam studi ini akan memakai metode pengumpulan data sekunder dengan memakai metode pengumpulan data studi pustaka, baik melalui literasi secara *online* maupun *offline*. Alasan penulis menggunakan metode tersebut karena studi pustaka merupakan metode pengumpulan data sekunder yang mudah digunakan untuk mengakses data secara sah, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah dalam konsistensi riset penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah upaya untuk menemukan hasil penelitian yang telah di proses sehingga mudah dipahami oleh pembaca penelitian. Analisis data mencakup menyediakan informasi mengenai hasil pengolahan data, mengelompokkan hasil tersebut, dan meringkasnya untuk membentuk kesimpulan penelitian.[[11]](#footnote-11) Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yiridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Suradadi Kabupaten Tegal (Studi Putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. SLW” metode yang akan digunakan adalah metode analisis penelitian kualitatif.

Alasan penggunaan metode analisis data kualitatif adalah diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam memahami tinjaun yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan.

1. **Sistematika Penulisan**

Skripsi ini ditulis secara metodis oleh penulis dan dibagi menjadi 4 (empat) bab. Skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan sub bab agar dapat memberikan penjelasan dan uraian yang jelas pada setiap permasalahan. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.** Bab ini menyajikan tinjauan umum terkait permasalahan yang dibahas, termasuk tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan, serta tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. Selain itu, akan dianalisis tinjauan yuridis terkait penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara dengan putusan Nomor: 48/Pid. B/2022/PN. Slw.

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini adalah bagian penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban umum atas permasalahan yang diambil dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang relevan.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

### Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ini dapat mencakup tindakan yang dilarang oleh undang-undang, melanggar norma hukum, atau melawan hukum yang berlaku. Tindak pidana harus dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab dan dikenai ancaman pidana. Tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana umum dan khusus, aktif dan pasif, serta sengaja dan tidak sengaja. Tindak pidana juga dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Tindak pidana sering disebut juga dengan istilah delik atau *strafbaarfeit.* Pakar hukum mendefinsikan tindak pidana dalam beragam arti, diantara penjelasan para ahli tersebut antara lain:[[12]](#footnote-12)

1. Pompe

“Secara teoritis, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan melalui tindakan pidana, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dalam hal perlindungan kepentingan hukum dan penegakan hukum memerlukan pelaksanaan pidana terhadap pelakunya”.

1. Van Hamel

“Definisi dari *strafbaar feit* yaitu kekuatan hukum yang diatur dalam undang-undang meliputi tindakan yang melanggar hukum, layak dikenakan pidana, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan”.

1. Indiyanto Seno Adji

“Tindak pidana dalam pandangan Indiyanto Seno Adji merupakan sebuah tindakan seseorang yang dikenai ancaman pidana, bersifat melanggar hukum, dan melibatkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya”.

1. E. Utrecht

“*Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, yang juga sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan positif (handelen) atau tindakan lalai (doen), serta dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut (keadaan yang muncul akibat tindakan itu)”.

1. Moeljatno

“Tindak pidana yaitu tindakan yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar hukum”.

1. Vos

“Yakni salah satu ahli yang merumuskan tindak pidana secara ringkas, yaitu tindakan manusia yang dikenai pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana”.

1. Wirjono Prodjodikoro

“Tindak pidana yaitu suatu prilaku yang bisa dikenakan hukuman pidana kepada pelakunya”.

1. Tresna

“Menjelaskan istilah peristiwa pidana sebagai tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dikenai tindakan hukuman”.

1. Satochid Kartanegara

“Merumuskan perbuatan pidana sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan ancaman hukuman”.

1. Roeslan Saleh

“Menjelaskan bahwa peristiwa pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang diatur oleh hukum”.

Definisi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah “perbuatan dari peraturan perundang-undangan diancam dengan hukuman pidana dan/atau tindakan”.

**2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

### Beberapa ahli telah mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

* Moeljatno menyebutkan “unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

a. Tindakan;

b. Apa yang dilarang (menurut per aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi mereka yang melanggar larangan)”.

Peraturan hukum mungkin melarang perilaku manusia. Makna utama dari frasa majemuk tindak pidana melekat pada perbuatan itu sendiri, karena berkaitan erat dengan individu. Ancaman atau diancam sehubungan dengan kegiatan kriminal menunjukkan bahwa hukuman atas pelanggaran tidak selalu diperlukan. Ancaman untuk melakukan kejahatan memiliki definisi yang luas, yang berarti bahwa hukuman pidana biasanya dijatuhkan. Aspek lain dari pengertian tindak pidana adalah diterima atau tidaknya pelaku mendapat hukuman atas perbuatannya.

* Menurut R. Tresna bahwa “tindak pidana terdiri dari:

a. Tindakan atau serangkaian tindakan (oleh manusia);

b. Yang melanggar peraturan perundang-undangan

c. Dikenakan tindakan hukuman”.

Dari unsur ketiga, frasa “diadakan penghukuman” mengindikasikan bahwa setiap tindakan yang dilarang seolah-olah selalu diikuti dengan hukuman. Berbeda dengan pandangan Moeljatno, di mana frasa “diancam pidana” menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak selalu atau tidak otomatis dikenakan pidana.

* Menurut Jonkers, bahwa “unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Tindakan (yang);

b. Bertentangan dengan hukum (yang terkait dengan)

c. Kesalahan (yang dilakukan oleh individu yang bisa)

d. dipertanggungjawabkan”.

* Schravendijk merinci “unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Tindakan (orang yang);

b. Bertentangan dengan kesadaran hukum;

c. Dikenai ancaman hukuman;

d. Dilakukan oleh individu (yang bisa).

e. Dipertanggungjawabkan atas kesalahan”.

* E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, menyebutkan bahwa “unsur-unsur tindak pidana meliputi:[[14]](#footnote-14)

a. Topik/Perkara;

b. Tindak kesalahan;

c. Tindakan yang bersifat melanggar hukum

d. Tindakan yang diatur atau dilarang oleh undang-undang, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana;

e. Waktu, lokasi, dan kondisi (unsur objek lainnya)”.

Secara teoritis, tindakan pidana mencakup dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terkait dengan perilaku melanggar hukum dan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman. Fokus utama dari pengertian objektif di sini adalah perilaku itu sendiri. Secara teoritis, ada komponen obyektif dan subyektif dalam tindakan ilegal. Gagasan pokok pengertian obyektif dalam hal ini adalah tindakan, dan aspek objektifnya adalah melakukan sesuatu yang melawan hukum dan menyadari akibat yang dilarang oleh undang-undang dengan prospek hukuman.[[15]](#footnote-15)

* Menurut Satochid Kartanegara “unsur delik terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah elemen yang berada di luar diri manusia, berupa:[[16]](#footnote-16)

a. Sebuah tindakan;

b. sebuah dampak;

c. situasi *(omstandigheid*)”.

Semua tindakan tersebut dilarang dan dikenakan hukuman menurut undang-undang bahwa “Unsur subjektif adalah elemen-elemen dari perbuatan yang bisa meliputi:

a. Kemampuan bisa dipertanggung jawabkan;

b. Tindak kesalahan *(schuld)*;

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana mencakup segala hal yang melekat pada diri pelaku, termasuk semua yang ada dalam hati dan pikirannya. Menurut PAF Lamintang, unsur-unsur ini:

1) Kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja *(dolus dan culpa)*;

2) Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau ponging seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain

3) Perencanaan sebelumnya atau *voorbedachte rade*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.

4) Perasaan takut atau *vress*, seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Karakteristik yang melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

2. Kualifikasi pelaku, misalnya sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana, atau sebagai pengurus atau komisaris dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHPidana;

3. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat”.

* Menurut Adami Chazawi “dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

2. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

3. Unsur tingkah laku;

4. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

5. Unsur objek hukum tindak pidana;

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;

7. Unsur kesalahan;

8. Unsur akibat konstitutif;

9. Unsur melawan hukum;

10. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

11. Unsur keadaan yang menyertai”.

**B. Tindak Pidana Pembunuhan**

**1. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang diberi awalan “pem” dan akhiran “an” sehingga menjadi pembunuhan, dengan suara sengau “m” yang berarti mati. Dengan demikian, pembunuhan merujuk pada tindakan atau perbuatan membunuh. Kata bunuh berarti mematikan atau menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan mengacu pada tindakan atau alat yang digunakan untuk membunuh. Pembunuh berarti orang yang melakukan pembunuhan, sementara pembunuhan merujuk pada perkara, perbuatan, atau proses membunuh.[[17]](#footnote-17)

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mengakhiri nyawa orang lain dianggap sebagai pembunuhan yang dalam bahasa Belanda disebut *doodslag.* Pasal 338 KUHP mengancam akan menjatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun kepada pembunuhnya. “Pembunuhan berencana (Belanda: *moord*) adalah istilah yang digunakan bila suatu pembunuhan direncanakan dan ancaman hukumannya paling lama dua puluh tahun penjara, penjara seumur hidup, atau hukuman mati” (Pasal 340 KUHP).[[18]](#footnote-18)

Penggunaan kata jiwa dan kehidupan sering digunakan secara bergantian. Pembunuhan adalah penghilangan nyawa dengan maksud menghilangkan nyawa korbannya. Pasal 338–340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa manusia. Pelanggaran ini dikenal sebagai pengkhianatan atau *doodslag* (pembunuhan).

Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan secara yuridis dan menetapkan bahwa: “Seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pembunuhan dengan niat didefinisikan sebagai ketika seseorang benar-benar dengan sengaja untuk melakukan tindakan tersebut, dengan mempertimbangkan aktivitas dan hasil atau keadaan apa pun yang diakibatkannya. Di sisi lain, pelaku mungkin tidak menginginkannya sama sekali. Sesuai dengan KUHP yang ada, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja disebut dengan pembunuhan.

Kesimpulan Pembunuhan diartikan sebagai pengambilan, penghancuran, atau pemusnahan hidup seseorang oleh orang lain. Dalam konteks ini, istilah “proses” mengacu pada berbagai individu, termasuk mereka yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas kejadian pembunuhan tersebut. Pembunuh yang sudah tidak diragukan lagi adalah orang yang melakukan tindakan tersebut secara langsung. Namun, setiap orang yang terlibat dalam tindakan ilegal tersebut termasuk mereka yang memberikan perintah, ikut serta dalam tindakan tersebut, meyakinkan orang lain untuk melaksanakannya, dan memberikan bantuan juga bersalah melakukan kejahatan.

**2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan**

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:

1. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana);

2. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana);

3. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana);

4. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana);

5. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana);

6. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana);

7. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana);

8. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana);

9. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana);

10. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana);

11. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana);

12. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana).

Dalam tindakan menghilangkan nyawa, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Ada wujud tindakan;

2) Terjadinya kematian;

3) Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kematian.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedahkan menjadi:

a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja diatur secara umum dalam Pasal 338 KUHPidana, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, akan dikenai pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana, yang menyatakan: “Pembunuhan yang dilakukan bersamaan dengan, disertai oleh, atau diawali oleh tindak pidana lain yang bertujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, menghindari hukuman jika tertangkap, atau memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara ilegal—dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara hingga maksimal dua puluh tahun.” Pasal 339 KUHP mendefinisikan jenis pembunuhan tertentu sebagai pembunuhan berat. Dalam pembunuhan berat, terdapat dua macam tindak pidana yang dilakukan secara simultan: pembunuhan biasa dan tindak pidana lainnya.

c) Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan telah merencanakan sebelumnya menghilangkan nyawa orang lain akan dikenakan hukuman atas pembunuhan berencana, berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu maksimal dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana mempunyai ancaman yang lebih besar dibandingkan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dan 339 KUHP yaitu hukuman mati, karena kejahatan seperti pada Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP tidak diberikan hukuman seperti ini. Faktanya, pembunuhan membawa ancaman terbesar terhadap keselamatan publik yakni terhadap keselamatan masyarakat. Pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman penjara hukuman maksimal dua puluh tahun dan kemungkinan penjara seumur hidup atau hukuman mati.

**C. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan**

**1. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa**

Berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHPidana, “unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

- Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja,

- Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain”.

1. Unsur sengaja mencakup baik tindakan maupun objeknya, yang berarti pelaku mengetahui atau menginginkan terjadinya kematian seseorang akibat perbuatannya. Kematian seseorang harus diinginkan dan menjadi tujuan dari tindakan tersebut, sehingga tindakan yang dijalankan mengandung tujuan atau maksud, yaitu terdapat niatan untuk melenyapkan nyawa orang lain.

2. Jika kematian seseorang terjadi tanpa adanya kesengajaan atau tanpa niat sebagai tujuan, serta tidak pernah direncanakan, maka peristiwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan (*doodslag*). Dalam kasus seperti ini, peraturan tindak pidana pembunuhan tidak berlaku, namuan bisa dikenakan peraturan tindak pidana lain yang berakibat kematian tanpa unsur kesengajaan.

3. Baik munculnya dampak atau tindakan yang menghasilkannya perlu dilakukan dengan sengaja. Artinya, pelaku harus menyadari serta menginginkan perbuatannya akan, atau bahkan pasti, berakibat dengan kematian seseorang.

4. Agar terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan dengan sengaja menurut Pasal 338 KUHPidana, diharuskan bahwa tindakan pembunuhan tersebut perlu dilakukan segera setelah munculnya maksud atau niat untuk membunuh, tanpa perencanaan atau berpikir panjang.

5. Pada kenyataannya, sering kali sulit untuk menunjukkan komponen kesengajaan ini, terutama ketika pelakunya licik dan berusaha menghindari alat kejahatan.[[20]](#footnote-20) Pada kenyataannya, menunjukkan komponen tujuan ini mungkin sulit dilakukan, terutama jika pelakunya licik dalam upayanya menghindari hukuman. Selain itu, aspek ini dapat dengan mudah ditunjukkan jika tersangka atau terdakwa memberikan pernyataan yang dianggapnya sebagai pengakuan, yaitu jika ia dengan bebas mengakui bahwa pengakuannya adalah bahwa ia memang menghendaki korbannya mati atau bahwa hal ini tidak benar adalah niatnya, maka unsur kesengajaan yakni unsur subjektif dapat dibuktikan. Hal ini hanya dapat diketahui dari keterangan pembuatnya sebelum pemeriksaan penyidik ​​atau sebelum sidang pemeriksaan.

6. Ketika kejahatan pembunuhan terjadi, tersangka atau terdakwa biasanya berusaha untuk tidak mengakui adanya unsur kesengajaan namun selalu berpura-pura bahwa kematian korban bukanlah hal yang diinginkannya atau bahwa ia hanya ingin menganiaya atau menyakitinya.

7. Berdasarkan unsur sengaja yang diuraikan di atas, unsur kesengajaan perlu dibuktikan dengan memeriksa cara perbuatan kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian dapat diketahui korban diharapkan atau diinginkan meninggal dunia oleh pelaku.

8. Menghapus nyawa seseorang;

a) Unsur ini mensyaratkan terjadinya kematian orang lain, bukan kematian pelaku itu sendiri.

b) Pengertian orang lain mencakup semua individu yang bukan termasuk pelaku itu sendiri.

c) Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tidak menyebutkan cara eksekusi atau alat yang digunakan dalam perbuatan tersebut, melainkan hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut harus mengakibatkan kematian atau hilangnya jiwa orang lain.

d) Kematian tersebut tidak harus terjadi seketika, itu bisa saja terjadi nanti.

e) Bahkan tindakan kecil yang berpotensi menyebabkan orang lain lenyap atau meninggal dunia diperlukan untuk memenuhi syarat hilangnya nyawa atau kematian orang lain.

Tindakan menghilangkan nyawa (orang lain) memerlukan tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[[21]](#footnote-21)

1. Adanya tindakan yang dilakukan;

2. Adanya kematian (orang lain);

3. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara tindakan dan akibat kematian (orang lain).

Unsur subjektif dari kesengajaan dalam tindakan menghilangkan nyawa orang lain memerlukan syarat yang juga harus dibuktikan. Secara khusus, tindakan menghilangkan nyawa orang lain harus dilakukan dalam waktu yang singkat setelah adanya niat membunuh dan pelaksanaannya, dan dalam jangka waktu yang cukup lama, pelaku dapat mempertimbangkan untuk membagi sesuatu, seperti mempertimbangkan apakah tujuannya atau tidak yang akan direalisasikan dalam implementasi dan bagaimana hal itu akan direalisasikan. Oleh karena itu, menurut Pasal 340 KUHP, “pembunuhan tersebut tergolong pembunuhan yang disengaja dan bukan pembunuhan biasa”.

Tindakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terjadi dalam jangka waktu yang singkat sejak timbul atau terbentuknya niat membunuh dan pelaksanaannya. Sebab, unsur subjektif dari kesengajaan berupa perampasan nyawa orang lain mempunyai syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu apakah pelaku mempertimbangkan untuk melakukan tindakan pembenuhuan tersebut, misalnya mempertimbangkan waktu yang pas untuk melakukn pembunuhan, alat yang akan digunakan, lokasi yang akan menjadi tindakn tersebut. Serta pelaksanaannya dan bagaimana hal tersebut akan diwujudkan. Oleh karena itu, pembunuhan tersebut digolongkan sebagai pembunuhan berencana dan bukan pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 340 KUHP.

Pahami kata *Opzettelijk* atau sengaja yakni muncul sebelum unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam rumusan ketentuan pidana Pasal 338 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa semua unsur di balik kata *opzettelijk* juga tercakup dalam *opzet.* Artinya, penunutut umum harus menuduhkan masing-masing aspek tersebut kepada terdakwa dan menunjukkan di pengadilan bahwa *opzet* terdakwa juga digunakan untuk mendukung tuntutan tersebut. Dalam hal ini, penuntut umum harus menunjukkan bahwa terdakwa:

1. Telah berniat (*willens*) melakukan tindakan tersebut dan menyadari (*wetens*) bahwa tindakannya bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Telah berniat bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa, dan

3. Telah menyadari bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa orang lain. Unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) mencakup niat (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) mengenai hal tersebut*.*

Berdasarkan tingkat kesengajaan, terdapat tiga bentuk, yaitu:[[22]](#footnote-22)

1. Kesengajaan sebagai niat (*opzet als oogmerk*);

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zakerheids bewustzijn*);

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Pengertian *opzettelijk* harus dimaknai dengan memasukkan ketiga bentuk kesengajaan tersebut, karena diyakini unsur tersebut terkandung dalam rumusan suatu tindak pidana pada pandangan *unsuropzettelijk*. Pendapat ini sesuai dengan penerapan hukum saat ini.

Pembunuhan merupakan tindak pidana berat, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 338 KUHP yang mendefinisikan “unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana yang mengharamkan tindakan tersebut mempunyai akibat tertentu dianggap sebagai tindak pidana materil (akibat yang dilarang)”.

Pembunuhan merupakan tindak pidana berat, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 338 KUHP yang mendefinisikan “unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana yang mengharamkan mempunyai akibat tertentu (akibat yang dilarang) disebut sebagai tindak pidana materil”.

Tindakan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain diungkapkan secara abstrak dan aktif. Agar suatu aktivitas dianggap aktif, beberapa bagian tubuh harus bergerak artinya ia tidak bisa diam atau pasif. Alasan disebut abstrak adalah karena tidak ada bentuk fisik tertentu yang ditampilkan oleh tindakan tersebut. Akibatnya, tindakan ini dapat mengambil bentuk-bentuk realitas nyata yang tak terbatas jumlahnya, termasuk memukul, memotong, menembak, dan sebagainya.

**2. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan**

Faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain:[[23]](#footnote-23)

1. Faktor kemampuan ekonomi

Salah satu hal yang membuat seseorang mudah terlibat dalam kejahatan berat sekalipun adalah keadaan ekonomi/keuangan keluarga. Karena orang-orang yang tumbuh dalam keluarga yang kondisi ekonomi/keuangannya kurang akan sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari sekeliling mereka.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Salah satu hal yang membuat seseorang mudah melakukan pembunuhan adalah rendahnya tingkat pendidikan/pengetahuan. Derajat pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab. Seseorang lebih mungkin melakukan perilaku nakal jika upaya pendidikan keluarganya tidak berhasil. Perilaku ini dapat terjadi di lingkungan keluarga atau di masyarakat tempat mereka bersosialisasi.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan adalah aspek penting yang tidak bisa hilang dari kehidupan manusia. Ketika masyarakat merespons kejahatan dan kenakalan, masalah-masalah tambahan sering kali muncul. Tindakan masyarakat yang tidak terkendali, misalnya masyarakat main hakim sendiri, merupakan indikasi melemahnya nilai-nilai sosial.

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Betapa cepat dan tiada hentinya popularitas perkembangan teknologi, dan betapa banyak orang yang mengapresiasinya, kemajuan teknologi juga dipandang berdampak pada pertumbuhan seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata uang; di satu sisi, kemajuan teknologi sangat bermanfaat dan memajukan ilmu pengetahuan, di sisi lain kemajuan teknologi yang pesat tanpa pengawasan dapat merugikan perkembangan psikologis seseorang.

Faktor-faktor yang secara langsung menyebabkan terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

1. Dendam

Seseorang mungkin memiliki dendam terhadap korban atau keluarganya dan akhirnya melampiaskan serta merencanakan pembunuhan. Pelaku dapat dianggap kejam karena ia telah merencanakan pembunuhan tersebut dengan matang.

2.Pengaruh Alkohol (Mabuk)

Pengaruh minuman beralkohol atau mabuk menjadi faktor yang menyebabkan orang lain melakukan pembunuhan. Seseorang yang mabuk atau berada di bawah pengaruh alkohol biasanya mudah marah, tersinggung, dan terluka.

**D. Pertanggungjawaban Pidana**

**1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya terkait dengan hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral atau etika yang diterima oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dijalankan dengan memenuhi prinsip keadilan. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dikenakan hukuman.

Menurut Roeslan Saleh, “pertanggungjawaban pidana artikan sebagai penjatuhan celaan objektif terhadap perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenai pidana karena tindakan tersebut. Celaan objektif merujuk pada perbuatan yang dilakukan seseorang yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun materiil. Sementara celaan subjektif berkaitan dengan pelaku perbuatan terlarang, yaitu individu yang melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan yang dilarang tetapi pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kesalahan dalam diri pelaku, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan”.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada beban tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku tindak pidana sehubungan dengan dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum. Namun, seseorang dapat kehilangan sifat pertanggungjawaban pidananya jika terdapat unsur yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab.

Chairul Huda menegaskan, “asas legalitas menjadi landasan bagi perbuatan melawan hukum, dan pelaku dapat menghadapi konsekuensi atas kesalahan yang dilakukannya. Artinya, jika seseorang melanggar hukum atau melakukan perbuatan buruk, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Tanggungjawab Pidana pada dasarnya adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk merespons pelanggaran terhadap norma atau aturan yang telah disepakati”.[[25]](#footnote-25)

Komponen utama pertanggungjawaban pidana adalah unsur kesalahan. Definisi tindak pidana tidak mencakup aspek pertanggungjawaban pidana. dan sebaliknya ini hanya mengacu pada suatu tindakan yang melanggar hukum atau dilarang olehnya. Dihukum atau tidaknya seseorang karena melakukan kejahatan tergantung pada ada atau tidaknya kecurigaan yang masuk akal untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam sistem hukum common law, pertanggungjawaban pidana selalu terkait dengan unsur mens rea dan pemberian hukuman (*punishment*).

Tanggungjawab pidana dan masyarakat saling berkaitan, yaitu dari segi bagaimana fungsi tanggung jawab dalam masyarakat. Di sini tanggungjawab berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah terjadinya tindak pidana dalam masyarakat dengan mempunyai kewenangan untuk melakukan kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kondisi mental, khususnya pikiran yang bersalah berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law.* Pikiran bersalah diartikan sebagai kesalahan subjektif di mana seseorang dianggap bersalah karena diyakini bahwa merekalah yang salah sehingga harus memikul tanggungjawab. Jika pencetusnya terbukti bertanggungjawab secara pidana, pelaku harus menghadapi konsekuensi. Karena tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pemikiran bersalah, pelaku tidak akan menghadapi konsekuensi.

Kesalahan akibat pelanggaran pedoman hukum atau undang-undang juga dianggap sebagai bentuk kesalahan mens rea. Setiap individu yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Berdasarkan pandangan ini, memasukkan kesalahan sebagai salah satu elemen akuntabilitas memberikan perlindungan bagi seseorang dan memberikan batasan pada kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap orang yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana, maka dengan adanya jaminan ini menandakan bahwa seseorang akan terlindungi dari aktivitas pelanggar hukum lainnya dan berfungsi sebagai kontrol.

Struktur pertanggungjawaban pidana yang dipilih tidak disebutkan secara tegas dalam KUHP. Kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian sering disebutkan dalam sejumlah pasal KUHP, sayangnya undang-undang tersebut tidak mendefinisikan kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian, namun berdasarkan pendapat para ahli hukum dan doktrin yang melingkupi pasal-pasal Dalam KUHP, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mencakup unsur kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang perlu dibuktikan oleh pihak yang berwenang. pengadilan. Artinya, selain terbukti melakukan tindak pidana, perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian untuk dapat mengkriminalisasi pelaku tindak pidana.[[26]](#footnote-26) Artinya, pembuktian komponen-komponen pertanggungjawaban pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas hakim dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, karena tanpa pembuktian unsur-unsur tersebut seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

**2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban merupakan cara untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dihukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk menyatakan bahwa seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dihukum tanpa melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Ini sejalan dengan asas legalitas, yaitu nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yang berarti tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengatur larangan tersebut.[[27]](#footnote-27)

Hukum pidana Indonesia mensyaratkan adanya perbuatan yang konkret atau tampak secara jelas. Artinya, hukum mengharuskan perbuatan tersebut terlihat secara nyata, karena seseorang tidak dapat dihukum hanya berdasarkan keadaan batin atau pikiran seseorang. Prinsip ini sesuai dengan asas cogitationis poenam nemo patitur, yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum hanya berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya.[[28]](#footnote-28)

b. Unsur kesalahan

Kesalahan atau disebut juga *schuld* dalam bahasa lain, adalah keadaan psikologis seseorang yang terkait dengan aktivitas yang dilakukannya sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas tindakannya.[[29]](#footnote-29) Dalam konteks ini, pengertian kesalahan digunakan dalam arti yang luas. Dalam KUHP, kesalahan dipahami dalam arti yang lebih sempit, yakni sebagai kelalaian, seperti yang tercermin dalam rumusan pasal 359 dan 360 dalam hukum Belanda.

Makna normatif maupun psikologis dapat dilekatkan pada istilah kesalahan. Kesalahan psikologis merupakan kejahatan nyata Yang dilakukan oleh seseorang tersebut adalah kesalahan yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan batin seseorang yang ada dalam diri individu tersebut. Kesalahan psikologis sulit dibuktikan karena tidak mempunyai bentuk nyata dan tidak dapat diidentifikasi.[[30]](#footnote-30) Kesalahan dalam arti normatif dimanfaatkan dalam hukum pidana Indonesia. Kesalahan yang dianggap normatif oleh orang lain adalah kesalahan yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dilihat dari kacamata norma hukum pidana, ini termasuk kesalahan yang ceroboh dan disengaja. Orang lain akan mengevaluasi suatu tindakan yang telah dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang relevan untuk menentukan apakah suatu kesalahan dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

a) Kesengajaan

Negara Indonesia sebagian besar kejahatan melibatkan *opzettelijik* atau tujuan, dan bukan rasa bersalah. Hal ini berkaitan dengan gagasan bahwa individu yang melakukan tindakan ini atau melakukan kejahatan dengan niat tertentu harus dihukum lebih berat. Jika menyangkut unsur perbuatan salah yang disengaja, tidak perlu menunjukkan bahwa pelaku mengetahui bahwa hukum membahayakan perbuatannya, juga tidak penting untuk menunjukkan bahwa tindakan pelaku adalah jahat. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku merencanakan tindakannya dan menyadari dampaknya. Ini sesuai dengan pepatah hukum yang menyebutkan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku. Akibatnya seseorang dianggap sadar akan hukum karena tidak mungkin seseorang bisa mengelak dari persyaratan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau haram.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga kini secara umum diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:[[31]](#footnote-31)

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja, dalam konteks kejahatan, berarti pelaku benar-benar menginginkan (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) tentang perbuatan serta akibat dari perbuatannya. Sebagai contoh, jika A merasa dipermalukan oleh B dan menyimpan dendam khusus terhadap B, A kemudian merencanakan untuk mencelakai B. Suatu hari, A membawa pisau dan menikam B, yang mengakibatkan kematian B. Dalam kasus ini, perbuatan A dapat dikatakan sebagai tindakan yang benar-benar ia kehendaki, dan kematian B akibat tikaman pisau A juga merupakan sesuatu yang diinginkannya.[[32]](#footnote-32)

Pengetahuan dan kehendak ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu dengan mempertimbangkan peristiwa-peristiwa konkret untuk menentukan apakah tindakan tersebut benar-benar diinginkan dan disadari oleh pelakunya. Kesalahan yang didasari oleh kesengajaan dengan maksud pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, dan jenis kesengajaan ini mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika kesengajaan dengan maksud ini terdapat dalam tindak pidana dan tidak ada pihak yang membantah, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat jika terbukti bahwa perbuatan tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud tertentu. Dengan kata lain, pelaku benar-benar menginginkan dan berusaha mencapai akibat yang menjadi dasar ancaman hukum pidana.

2. Sengaja sebagi suatu keharusan

Kesengajaan jenis ini terjadi ketika pelaku melakukan perbuatannya bukan untuk mencapai akibat dari perbuatannya itu sendiri, melainkan sebagai langkah untuk mencapai tujuan lain. Dengan kata lain, dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku menyadari tindakan yang dilakukannya tetapi tidak mengharapkan akibat yang timbul dari tindakan tersebut.[[33]](#footnote-33)

Sebagai contoh, jika A ingin mengambil tas yang berada di belakang etalase toko dan untuk mencapainya A perlu memecahkan kaca etalase, maka pecahnya kaca tersebut bukanlah tujuan utama A. Namun, A melakukan tindakan tersebut untuk mencapai tujuan lain. Dalam hal ini, kesengajaan A dalam menghancurkan kaca adalah bentuk kesengajaan yang disertai dengan kesadaran akan keharusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Sengaja

Sengaja dalam konteks kemungkinan berarti bahwa pelaku sebenarnya tidak menginginkan akibat dari perbuatannya, tetapi ia sudah menyadari bahwa akibat tersebut mungkin bisa terjadi. Meskipun demikian, pelaku tetap melanjutkan perbuatannya dengan mengambil risiko tersebut. Scaffrmeister memberikan contoh seorang pengemudi yang mengemudikan mobil ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi terus memacu mobilnya dengan harapan petugas polisi akan melompat ke samping. Meskipun pengemudi menyadari bahwa ada risiko petugas polisi bisa tertabrak atau melompat ke samping, ia tetap melanjutkan tindakan tersebut.

b) Kealpaan *(culpa)*

Pasal-pasal dalam KUHPidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian kealpaan, diperlukan pandangan dari para ahli hukum. Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang muncul ketika pelaku tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan kelalaian tersebut disebabkan oleh perilaku individu itu sendiri.

Moeljatno menjelaskan bahwa “kealpaan merupakan suatu struktur yang kompleks, di mana satu sisi berkaitan dengan perbuatan konkret seseorang, sementara sisi lainnya terkait dengan keadaan batin individu. Kelalaian dibagi menjadi dua jenis: kelalaian yang disadari (alpa) dan kelalaian yang tidak disadari (lalai)”.

Kelalaian yang disadari, atau alpa, adalah ketika pelaku menyadari adanya risiko tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut dengan harapan bahwa akibat buruk atau risiko tidak akan terjadi. Sebaliknya, kelalaian yang tidak disadari, atau lalai, terjadi ketika seseorang tidak menyadari adanya risiko atau kemungkinan akibat buruk dari perbuatannya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemikiran atau karena pelaku lengah terhadap potensi risiko yang ada.

Kelalaian yang disadari adalah ketika seseorang menyadari bahwa jika ia tidak melakukan suatu perbuatan, maka akan timbul akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Sebaliknya, kealpaan yang tidak disadari terjadi ketika pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. Seandainya pelaku mempertimbangkan akibat tersebut, ia mungkin akan menghindari melakukan perbuatan itu.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan kondisi psikologis pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini erat hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukuman bagi pelaku. Hakim harus membuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab, karena jika seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan tersebut, maka pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pelaku tidak dapat dikenakan pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Andi Zainal Abidin menyebutkan bahwa banyak undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab; sebaliknya, KUHP justru mengatur hal yang berlawanan dengan kemampuan bertanggung jawab. Pasal yang mengatur mengenai hal tersebut adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. “Barang siapa melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya cacat dalam perkembangan jiwa (gebrekkige ontwikkeling) atau gangguan akibat penyakit, tidak akan dikenakan pidana.

2. Jika terbukti bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya cacat dalam perkembangan jiwa atau gangguan akibat penyakit, hakim dapat memutuskan agar orang tersebut dirawat di rumah sakit jiwa untuk masa percobaan maksimal satu tahun”.

Pasal 44 menyatakan bahwa “Seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya jika ia tidak memiliki unsur kemampuan untuk bertanggung jawab. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab muncul ketika terdapat kesalahan dalam diri pelaku, yang terbagi menjadi dua jenis kesalahan, yaitu:

1. Selama masa pertumbuhannya, pelaku mengalami gangguan mental, yang memengaruhi kemampuannya untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.

2. Seandainya pelaku mengalami gangguan jiwa akibat suatu penyakit, sehingga kemampuannya untuk berpikir secara normal atau membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk menjadi kurang optimal”.

Kemampuan bertanggung jawab juga terkait dengan usia pelaku tindak pidana. Berarti, cuma pelaku yang berada dalam rentang usia tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh psikologis usia terhadap perilaku seseorang. Pada usia tertentu, anak belum sepenuhnya menyadari tindakan yang dilakukannya, sehingga mereka kesulitan membedakan antara yang benar dan yang salah, dan ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi perbuatannya. Jika anak yang masih berada dalam rentang usia tersebut terlibat dalam tindak pidana dan menjalani proses pidana, maka secara psikologis hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka di masa dewasa.[[34]](#footnote-34)

Dalam proses pemidanaan, hakim wajib membuktikan dan mencari apakah pelaku mempunyai unsur kemampuan bertanggung jawab. Jika pelaku tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab, selain karena usianya yang belum cukup atau karena gangguan pada keadaan psikologisnya, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Pelaku tindak pidana tidak bisa menjalankan tindakan lain selain perbuatan tindak pidana tersebut, meski hal ini tidak diinginkannya. Akibat dari perbuatannya, pelaku harus menjalani proses hukum. Meskipun pelaku mungkin tidak menginginkan hal tersebut, ia tetap harus menghadapi jalur hukum karena faktor-faktor eksternal yang memengaruhi tindakannya.[[35]](#footnote-35)

Faktor-faktor eksternal atau internal inilah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain yang dapat menghapus kesalahannya. Dengan kata lain, dalam konteks ini, terdapat alasan-alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban pelaku harus ditunda hingga dapat dipastikan adanya atau tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku. Meskipun pelaku mungkin mendapat hinaan, hinaan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena pelaku tidak dapat melakukan tindakan lain selain tindak pidana yang telah dilakukannya[[36]](#footnote-36)

Dalam doktrin hukum pidana, alasan pemaaf dan alasan pembenar memiliki perbedaan penting. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang memberikan pemaafan kepada seseorang meskipun ia telah melakukan tindak pidana. Perbedaan ini terletak pada fungsi masing-masing; alasan pembenar berfungsi sebagai pembenaran atas perbuatan yang melawan hukum, sementara alasan pemaaf memberikan pemaafan terhadap pelanggar hukum, walaupun tindak pidana telah dilakukan.

Faktor pembenarnya mencakup penerapan persyaratan undang-undang, pelaksanaan perintah pengadilan, dan keadaan darurat hukum pidana seperti pembelaan paksa. Salah satu pembenarannya adalah keadaan darurat yang menjadi alasan seseorang harus mengambil keputusan karena dihadapkan pada skenario yang sulit. Ada tiga cara keadaan darurat ini dapat menjadi kemungkinan sebagai perilaku kompulsif. Skenario pertama adalah terjebak dan harus memilih di antara dua kepentingan yang sama pentingnya. Misalnya saja seseorang sedang berada di tengah laut bersama tiga orang teman, dan satu-satunya peralatan penyelamat yang tersedia adalah sebuah papan yang hanya bisa menampung dua orang. Dalam situasi ini, tidak mungkin menyelamatkan semua teman jika salah satu dari mereka harus ditinggalkan. Skenario kedua adalah seseorang terpecah antara tugas dan kepentingan. Skenario ketiga adalah seseorang mendapati dirinya berada dalam kesulitan di mana mereka memiliki dua tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Pasal 49 ayat 1 KUHP mendefinisikan “Pembelaan Terpaksa, yang menetapkan keadaan-keadaan yang memungkinkan dilakukannya suatu tindak pidana untuk membela diri”. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan standar yang sangat ketat. Misalnya, pasal 49 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa untuk memenuhi syarat pembelaan paksa, harus ada penyerangan melawan hukum yang bersifat tiba-tiba atau segera terhadap diri, kehormatan moral, atau harta benda seseorang. Dalam situasi ini, pertahanan diperlukan. Pertahanan paksa ini dirancang untuk digunakan jika terjadi serangan yang akan datang. Pembelaan yang dipaksakan ini terjadi karena jika seseorang tidak membela diri, hal buruk akan menimpanya atau membahayakan dirinya sendiri.

Mengikuti ketentuan perundang-undangan, ini terjadi ketika seseorang memiliki dua tanggungjawab yakni dalam skenario ini, mereka harus berperilaku sesuai dengan situasi dan tidak melanggar hukum. Misalnya, jika seseorang tidak memakai helm di jalan raya, petugas polisi berhak menghentikannya namun tidak berhak menembak. Seorang petugas berwenang menembak seseorang jika keadaan berubah dan orang yang melanggar peraturan lalu lintas menjadi tersangka utama dalam pengejaran polisi.[[37]](#footnote-37)

Ikuti Arahan Jabatan Yang *Valid.* Hubungan hukum publik antara yang diperintah dan yang memerintah merupakan prasyarat bagi suatu tatanan jabatan. Artinya, meskipun orang tersebut menggunakan prosedur dan alat yang tepat untuk menyelesaikan tindakannya, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena mengikuti arahan resmi.[[38]](#footnote-38) Yang dimaksud dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana adalah ketidakmampuan hukum pidana untuk menerima tanggung jawab, kekuatan koersifnya, dan penggunaan pembelaan paksa yang berlebihan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ini mengacu pada situasi di mana seseorang mampu atau tidak mampu memikul tanggung jawab atas suatu masalah tertentu. lengka.

Menurut pasal 48 KUHP, “Barangsiapa melakukan tindak pidana karena adanya dorongan kekuasaan yang memaksa, maka tidak dapat dihukum,” pasal tersebut mengatur tentang daya paksa. Istilah dorongan menunjukkan bahwa pelaku secara psikologis dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut. Tekanan psikologis bisa disebabkan oleh perilaku orang lain, atau mungkin berkembang seiring berjalannya waktu dan akhirnya meledak sebagai sebuah tekanan atau dorongan.

Pembelaan terpaksa melampaui batas yakni apabila hal ini terjadi maka pembelaan terpaksa melampaui batas dan termasuk dalam alasan pemaaf. Hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dan dapat dikritik namun tidak dikenakan hukuman. Misalnya, ketika seorang pencuri di rumah mendekati seseorang yang sedang memasak di dapur dan mengacungkan pisau, orang tersebut akan menikam pencuri tersebut hingga tewas demi membela diri. Dalam pengertian ini, hakim harus menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana karena sebab yang sah atau karena sebab yang dapat dimaafkan.

1. Fai, “Hukum Pidana”, 2022, https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 48/Pid. B/2022/PN. Slw. [↑](#footnote-ref-2)
3. Fiddy Yeni Alfianti, “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 10/PID/2020/PT JAP”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm. 94, t.d. repository.uinkhas.ac.id/ [↑](#footnote-ref-3)
4. Sindi Febrianda BR Sitepu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019, hlm. 76, t.d. repository.umsu.ac.id/ [↑](#footnote-ref-4)
5. Jona Martua Manullang “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Politik Pelalawan”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Riau : Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022, hlm. 85, t.d . repository.uir.ac.id/ [↑](#footnote-ref-5)
6. Zuhcri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* Makassar : Syakir Media Press, 2021, Cet. ke-1, hlm. 6. https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf [↑](#footnote-ref-6)
7. Achmad Irwan Hamzani, *et.al., Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal,* Tegal : t.p, 2023, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-7)
8. Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif,* Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 51. http://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. H.P. Penggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Terbitan Ke-1, Bandung : Penerbit Alumni, 2023, hlm. 171. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MM3LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hp+panggabean&ots=wVSMIS7RQd&sig=K3CaemUtP8HZvgc87NsI1KJcwro> [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram: Mataram University Press, 2020, Cet. ke-1, hlm. 65. http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf [↑](#footnote-ref-10)
11. Syafrida Hanif Sahir, *Metodologi Penelitian,* Bojonegoro : KBM Indonesia, 2021, Cet. ke-1, hlm. 45. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf [↑](#footnote-ref-11)
12. Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sangir Multi Usaha, 2022, Cet. ke-1, hlm. 37. https://repo.jayabaya.ac.id/2154/1/BUKU%20HUKUM%20PIDANA%20FINAL.pdf [↑](#footnote-ref-12)
13. Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79 [↑](#footnote-ref-13)
14. Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 99 [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, makassar, hlm. 67 [↑](#footnote-ref-15)
16. Leden Marpaung, 2009, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-16)
17. Soesilo, R.T.th, 2010, *Kriminologi,* Politeia, Bogor, hlm. 108 [↑](#footnote-ref-17)
18. Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129- [↑](#footnote-ref-18)
19. Riswandi Rahmat R., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), Hal. 20 [↑](#footnote-ref-19)
20. Riswandi Rahmat R., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), Hal. 20 [↑](#footnote-ref-20)
21. Riswandi Rahmat R., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), Hal. 23 [↑](#footnote-ref-21)
22. Riswandi Rahmat R., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), Hal. 24 [↑](#footnote-ref-22)
23. Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan),* Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 45. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* Hal. 51. [↑](#footnote-ref-24)
25. Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan ke-2,* Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68 [↑](#footnote-ref-25)
26. Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers, hlm-52 [↑](#footnote-ref-26)
27. Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Edisi revisi*,* Jakarta, Renika Cipta, hlm-25 [↑](#footnote-ref-27)
28. Frans Maramis, 2012, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm-85 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid,* hlm-114 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid,* hlm-115 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*, hlm-121 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*, hlm-122 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*, hlm-122 [↑](#footnote-ref-33)
34. Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80 [↑](#footnote-ref-34)
35. Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm-116 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*, hlm-67 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid* [↑](#footnote-ref-38)